

PASAR PRODUK RAMAH LINGKUNGAN
Model memperagakan busana ecoprint saat kegiatan Eco Market di kawasan pariwisata The Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (25/2). Eco Market tersebut menampilkan berbagai produk UMKM dan kegiatan kerajinan yang ramah lingkungan guna mendorong sektor usaha dan pariwisata yang berkelanjutan.



BPH Migas Segera Merevisi Aturan tentang Subpenyalur BBM Subsidi dan Kompensasi

Menurut Erika Retnowati, pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau, tidak terkecuali di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur BBM subsidi dan/atau kompensasi.

JAKARTA (IM) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi tersebut diperlukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

“Saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, maka subpenyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi,” ungkapnya saat “Public Hearing Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015” di Bandung, dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/2).

Menurut Erika, pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau, tidak terkecuali di

daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur BBM subsidi dan/atau kompensasi.

Erika mengatakan dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, terutama di wilayah kepulauan, yang belum terdapat penyalur, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM.

“Kadang mereka berinisiatif untuk bersama-sama mengambil BBM di satu tempat, kemudian dibawa dengan jerigen-jerigen. Namun, di tengah jalan, mereka terpaksa diberhentikan dan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena memang kita belum mengaturnya. Dengan adanya revisi aturan ini, diharapkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi bisa menikmatinya dengan lebih mudah,” paparnya.

Ia menegaskan subpenyalur bukan kegiatan usaha hilir migas, namun merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM

subsidy dan kompensasi di kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM, dan menyalurkannya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan bupati setempat. “Subpenyalur itu perwakilan dari konsumen pengguna, bukan pengusaha atau pengecer. Jangan dipersiapkan bahwa subpenyalur merupakan pengecer yang dilegalkan, bukan seperti itu,” tegasnya.

Erika melanjutkan subpenyalur adalah perwakilan sekelompok orang atau konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyaluran, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang ditugaskan untuk mengurus atau mengambil BBM subsidi atau kompensasi yang menjadi haknya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim meminta instansi terkait dan pemerintah daerah segera menyampaikan masukan agar revisi aturan dapat segera diimplementasikan di masyarakat.

Ia menjelaskan *public hearing* terkait subpenyalur telah dua kali dilaksanakan dan diharapkan instansi terkait serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan. “Masukan dapat segera disampaikan agar aturan dapat segera diimplementasikan,” ucap Halim.

Beberapa poin revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut di antaranya terkait definisi subpenyalur, prosedur penunjukan dan penetapan subpenyalur, format pembinaan dan pengawasan, lokasi pendirian subpenyalur, alokasi volume kebutuhan masing-masing konsumen pengguna, dan sanksi. • **hen**

Sinar Mas Land Hadirkan West Village Business Park, Klaster Komersial Premium Terbaru di BSD City



West Village Business Park di BSD City.

BSD CITY (IM) – Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) selalu berkomitmen untuk terus adaptif, strategis, dan taktis dalam memenuhi kebutuhan pasar properti. Berdasarkan laporan BSDE, segmen komersial membukukan pencapaian yang positif sebesar Rp2,62 triliun di akhir 2023.

Angka tersebut merupakan prapenjualan terbesar di

tahun lalu atau berkontribusi sebesar 28% terhadap total prapenjualan. Hal tersebut menunjukkan minat konsumen akan ruang usaha terus meningkat. Data penjualan tersebut membuat Sinar Mas Land optimis untuk kembali meluncurkan produk komersial terbaru yakni West Village Business Park di BSD City.

West Village Business Park mengusung konsep

“Modern Comfortable Facade Design”, dengan menawarkan ruang fleksibel untuk bisnis berbagai ukuran yang setiap unitnya terdiri atas 3 dan 4 lantai. West Village Business Park memiliki beberapa tipe unit yakni *standard building*, *double facade*, dan *studio loft*. West Village Business Park memiliki beragam fasilitas di antaranya *multiple access entrance*, jalur pedestrian yang aksesibel, sistem keamanan

24 jam, hingga lahan parkir yang luas.

Keunggulan lainnya, produk komersial ini juga memiliki tipe *double facade building* yang dapat diakses dari dua sisi, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memaksimalkan bisnisnya. Klaster komersial tersebut sangat cocok untuk berbagai jenis usaha, seperti *office*, kafe, *restaurant*, *salon*, *beauty clinic*, *boutique*, *bakery*, *non-formal education*, dan bisnis ritel/komersial lainnya.

CEO Commercial BSD Sinar Mas Land, Anna Budiman mengatakan, Sinar Mas Land dengan bangga meluncurkan West Village Business Park, yang merupakan sebuah inovasi terbaru di *sunrise area property* yang lokasinya menjadi penghubung antara BSD City dan Gading Serpong. Produk komersial tersebut menawarkan peluang bisnis dengan konsep yang unik, modern, dan tentu saja nyaman bagi calon pembelinya.

“Klaster komersial ini menjadi tempat strategis di mana para pengusaha dapat menjalin koneksi serta merasakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Kami sangat opti-

mistis penjualan West Village Business Park dapat diserap pasar dengan baik, dengan harga yang kami tawarkan mulai dari Rp2,7 miliaran,” kata Anna.

Berlokasi strategis di BSD City bagian barat, West Village Business Park dilengkapi dengan fasilitas bisnis dan *lifestyle center*, seperti AEON Mall, The Breeze, QBig, dan Grand-Lucky Superstore.

Selain itu, ada pula pengembangan RANS Nusantara Hebat (Pusat Kuliner UMKM terbesar di BSD City) dan EAST-VARA Mall (*Lifestyle Commercial Center*) yang diproyeksikan segera beroperasi di tahun 2024 ini.

West Village juga dekat dengan kawasan perkantoran di antaranya BSD Green Office Park, Foresta Business Loft 1-5, Astra Biz Center, serta Wisma BCA. Menariknya, pada tahun 2025 mendatang, BSD City Park sebuah *farm leisure theme park* yang dikembangkan Sinar Mas Land bersama Jatim Park, Cimory Dairyland, dan Taman Rekreasi HeHa juga akan segera hadir. • **vit**

BNI Salurkan Kredit Bisnis ke Diaspora di Hong Kong

JAKARTA (IM) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan fasilitas kredit kepada diaspora wiraswastawan di luar negeri. Kali ini, BNI memberikan fasilitas diaspora loan kepada Kampung Kita, sebuah jaringan toko yang menyediakan produk-produk Indonesia di Hong Kong.

Kampung Kita telah beroperasi sejak tahun 2013, memudahkan para diaspora Indonesia untuk memperoleh berbagai produk, terutama makanan yang berasal dari Indonesia. Hingga saat ini, Kampung Kita telah memiliki tujuh jaringan toko di Hong Kong. Penyaluran diaspora loan ini secara simbolis dilakukan oleh Direktur Network & Services BNI Ronny Venir, kepada Pemilik Kampung Kita Phang Tjhong Phin, dalam acara Edukasi Keuangan Bagi Diaspora dan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Sabtu (24/2).

Ronny Venir menjelaskan, BNI Hong Kong adalah cabang luar negeri BNI yang memiliki *full branch license*, sehingga dapat memberikan layanan perbankan bagi nasabah korporasi hingga nasabah ritel, termasuk diaspora pengusaha.

“Peran kantor BNI di luar negeri sangat penting sebagai jembatan bisnis antara Indonesia dan dunia. Keberhasilan Kampung Kita adalah bukti bahwa produk-produk Indonesia

dapat sukses di pasar internasional. BNI akan terus mendukung ekspansi bisnis Kampung Kita dan bisnis diaspora lainnya,” ujar Ronny dalam keterangan resmi.

BNI melihat potensi besar dari para diaspora yang berbisnis di luar negeri. BNI menginisiasi diaspora loan dengan tujuan memberikan dukungan pembiayaan untuk Indonesia-Related business yang dijalankan oleh Diaspora. “Diaspora Loan ini merupakan salah satu langkah BNI dalam menggali potensi bisnis, baik itu dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya,” ujarnya.

Seremoni tersebut turut disaksikan oleh Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Yul Edison dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Yul Edison memberikan apresiasi kepada BNI atas kontribusinya dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis diaspora di luar negeri, khususnya di Hong Kong.

“BNI telah menjadi mitra strategis dari KJRI Hong Kong untuk meningkatkan kesejahteraan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Saya berharap penyaluran diaspora loan BNI ini juga dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yul Edison. • **dro**

Kementerian PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulbar

JAKARTA (IM) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut.

Berdasarkan siaran pers Kementerian PUPR, Minggu (25/2), bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi. “Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki dikutip dari Antara.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare. Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023. “Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi den-

gan progres fisik 27 persen,” kata Dedi.

Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya - PT Tuah Agung Anugrah - PT Cirriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp1,02 triliun.

Menurut keterangan tersebut, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajong, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membanding Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder. • **dot**

Pemerintah dan ADB Luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN

JAKARTA (IM) - Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan Laporan Baseline Tinjauan Lokal Sukarela (Voluntary Local Review/VLR) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nusantara dalam Forum Pembangunan Berkelanjutan Asia-Pasifik ke-11.

Laporan yang turut didukung oleh ADB ini akan memberikan kontribusi terhadap upaya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam semua aspek pembangunan kota.

“Saya berterima kasih kepada ADB dan para mitra pembangunan atas peran mereka dalam mewujudkan

upaya ini lebih lanjut. Laporan baseline dan Tinjauan Lokal Sukarela yang akan datang tidak hanya merupakan langkah menuju tujuan ambisius Indonesia dalam membangun Nusantara yang berkelanjutan, tetapi juga merupakan komitmen dalam perjalanan kami untuk mengintegrasikan Nusantara ke dalam upaya global untuk mencapai SDGs

yang diuraikan dalam Agenda 2030,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (24/2).

Dikutip dari Antara, laporan tersebut menyoroti kontribusi Nusantara terhadap SDGs, termasuk akses terhadap perumahan yang terjangkau dan layanan infrastruktur dasar seperti air, transportasi, dan

sanitasi. Kemudian mencatat area-area dimana perbaikan dalam implementasi SDGs diperlukan, seperti potensi ketidakesetaraan pendapatan yang timbul dari kesenjangan ekonomi antara penduduk Nusantara yang baru dan masyarakat setempat.

Laporan ini juga menjadi dasar bagi pengembangan VLR di masa mendatang ten-

tant implementasi SDGs. VLR akan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengukur kemajuan SDGs, terutama untuk kota-kota baru dan berkembang, dimana praktik pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang fundamental.

“Pemerintah daerah, seperti OIKN, memainkan pe-

ran penting dalam mengimplementasikan SDGs. ADB senang dapat bermitra dengan OIKN dalam laporan baseline SDGs ini, yang memberikan contoh bagaimana kepemimpinan lokal dan langkah-langkah proaktif dapat mendorong perubahan yang berarti dalam skala global,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga. • **pan**